

TINJAUAN TERHADAP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENILAI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Muhammad Alfikri Widiyanto

malfikriw38@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to understand and examine the implementation of program and government institution activities, using Value For Money. The research was descriptive-qualitative. Moreover, the population was the Cooperation and UKM Agency of East Java province. The instrument in the data collection technique used documentation and interview. Based on the performance measurement using Value For Money, it concluded that in 2019 due to economist assessment; all main indicators of Cooperation and UKM Agency of East Java province had been applied economically. Furthermore, according to the result of an efficient assessment, all main indicators had also been applied efficiently. In 2020, according to the result of the effectiveness assessment, all main indicators had been applied effectively indeed. In addition, the performance in 2020 due to economist assessment, showed that the main indicator had been implemented economically. While on the efficiency assessment, one of the two main indicators resulted efficiently. On the other hand, according to the effectiveness assessment, one of the two main indicators had less effective results. However, another indicator showed effectiveness. In brief, the development of performance measurement was needed; with some relevant performance indicators.

Keywords: performance measurement, value for money, economy, efficiency, effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah menggunakan perspektif *Value For Money*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan metode *Value For Money*, disimpulkan bahwa kinerja tahun 2019 berdasarkan pengukuran ekonomis seluruh indikator utama dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan ekonomis, Hasil pengukuran efisiensi juga menunjukkan seluruh indikator utama efisien, hasil pengukuran efektivitas juga menunjukkan bahwa seluruh indikator utama tahun 2020 efektif. Kinerja tahun 2020 berdasarkan pengukuran ekonomis menunjukkan indikator utama ekonomis, kemudian pada pengukuran efisiensi satu dari dua indikator utama menunjukkan hasil yang efisien, namun pada pengukuran efektivitas satu dari dua indikator utama menunjukkan hasil kurang efektif dan satu lainnya menunjukkan hasil efektif. Pengembangan pengukuran kinerja juga diperlukan, didukung dengan indikator kinerja yang relevan.

Kata Kunci: pengukuran kinerja, *value for money*, ekonomi, efisiensi, efektivitas

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja adalah salah satu faktor penting dalam suatu organisasi, termasuk juga pada organisasi sektor publik, pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk memulai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik dan tepat sasaran kedepannya. Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja, pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 2019: 7). Dengan dilaksanakannya akuntabilitas diharapkan instansi pemerintah dapat menerapkan Akuntabilitas Publik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018: 100),

akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.

Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pengukuran kinerjanya LKIP menggabungkan dua aspek pengukuran, yaitu kinerja keuangan dan kinerja capaian program. Peninjauan juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada peraturan presiden tersebut dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kasus-kasus diatas terbentuklah kesadaran masyarakat yang dapat kita lihat melalui banyaknya kritik dan saran yang diberikan warga kepada instansi pemerintah yang meminta instansi pemerintah lebih akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud adakah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang. badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau memiliki wewenang untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban (Halim, 2014: 830).

Kinerja instansi pemerintah saat ini dalam sorotan oleh masyarakat ramai mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik, hal ini didasari oleh banyak nya isu yang berkembang mengenai organisasi sektor publik diperkirakan menjadi tempat pemborosan dana daerah, kurang efisiensinya kinerja, serta institusi yang selalu merugi. Dapat kita lihat ada beberapa kasus yang menjadi sorotan besar masyarakat kepada instansi pemerintahan, semisal adanya penyelewengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), lalu juga ada ketidak optimalan penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh kementerian sosial kepada ke masyarakat bahkan terlihat pilih kasih dalam melakukan pembagian bantuan sosial. Dengan adanya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi yang membuat semua mata tertuju kepada kinerja instansi pemerintah dan juga melihat dampak yang bisa diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur yang mampu membantu perkembangan ekonomi daerah dengan cara melalui pembinaan serta pelatihan pelaku-pelaku Koperasi dan UKM di Jawa Timur, maka penulis ingin mengetahui tingkat kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang sekiranya akan diukur menggunakan perspektif analisis *value for money*.

Penelitian Sari (2014) menyebutkan bahwa kinerja Kabupaten Sumenep pada periode 2010-2013 telah menjalankan keseluruhan program dan kegiarannya secara ekonomis, efisien dan efektif meskipun sempat terjadi fluktuasi. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan maksud tersebut, maka penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada peninjauan terhadap laporan keuangan instansi pemerintah yang akan digunakan sebagai dasar melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pada penelitian terbaru ini peneliti menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada dua periode yang berbeda dimana salah satu periodenya kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dilakukan disaat terjadinya pandemi, dan peneliti akan melakukan peninjauan serta melakukan analisa terhadap laporan tersebut karena peneliti merasa fenomena pandemi merubah rencana kerja, anggaran kerja yang digunakan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi laporan kinerja instansi pemerintah tersebut.

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terjadi penyimpangan topik yang mungkin bisa terjadi akibat adanya pembahasan yang melebar dari topik, maka dalam penyusunan penelitian, penulisan penelitian serta pembahasan penelitian penulis akan membatasi fokus penelitian agar pada penelitian ini tidak ada penelitian yang melebar dan tidak terarah. Fokus yang akan menjadi ruang lingkup pada penelitian ini yaitu mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada periode tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjelaskan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yang dinilai dengan menggunakan perspektif *value for money*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengukur, serta menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah tersedia dari suatu instansi pemerintah dengan menggunakan perspektif *value for money*.

TINJAUAN TEORETIS

Organisasi Sektor Publik

Fahmi (2013:1) berpendapat bahwa organisasi publik merupakan merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Dapat kita pahami bahwa organisasi sektor publik merupakan sebuah organisasi yang memiliki orientasi untuk melayani kepada masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada berbagai pihak, yang bertujuan untuk mencapai tujuan manajemen perusahaan dengan sumber daya yang dimilikinya.

Pengukuran Kinerja

Menurut Moehariono (2012: 96) pengukuran kinerja atau *performance measurement* mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, sedangkan menurut Mahmudi (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan saran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas maka pengukuran kinerja perusahaan adalah sebuah cara untuk menilai seberapa sukses kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencoba mencapai tujuan perusahaan, serta dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran kinerja perusahaan akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan semua kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas perusahaan maka manajemen diharapkan akan mampu merespon hal tersebut guna memastikan tujuan perusahaan bisa tercapai.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 121) mengemukakan pendapat bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengukuran kinerja sektor publik berguna bagi manajer dan masyarakat memahami perkembangan dan pencapaian yang telah didapatkan oleh organisasi dalam

proses mencapai tujuan perusahaan yang mungkin berguna bagi masyarakat dan manajemen organisasi untuk mempertimbangkan kebijakan apa yang akan diambil.

Bertepatan dengan disetujuinya Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja instansinya. Dengan adanya LKIP diharapkan selain dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, juga dapat menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Mahmudi (2015) berpendapat bahwa tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi telah berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. (2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Penilaian kinerja juga merupakan salah satu sarana bagi pegawai untuk digunakan sebagai pembelajaran tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki untuk mencapai kinerja terbaik. (3) Memperbaiki Kinerja Periode-periode Sebelumnya. Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan keadaan dimana orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Dengan begitu maka perusahaan akan mengalami peningkatan kinerja tiap periode ke depannya..(4) Memberikan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan dan hukuman. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji/tunjangan, promosi atau hukuman seperti penundaan promosi atau teguran yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, keterampilan dan kontribusi tiap pegawainya terhadap kinerja organisasi. (5) Memotivasi pegawai Adanya penilaian kinerja yang berhubungan langsung dengan manajemen, maka manajemen berhak memberikan kompensasi bagi pegawai yang berkinerja tinggi atau baik dengan memberikan penghargaan. (6) Menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai yang akan digunakan menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Sebagai bahan untuk dilakukannya evaluasi kinerja organisasi dan berguna bagi pihak internal maupun eksternal organisasi.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Yuwono *et al* (2007) adalah sebagai berikut: (1) Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya, dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. (2) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. (3) Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*). (4) Membuat suatu sasaran strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. (5) Membangun consensus untuk melakukan sesuatu perubahan dengan memberi *reward* atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Value For Money

Menurut Mardiasmo (2009: 04). *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan ada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sementara itu menurut Mahmudi (2015), *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

Pada masa dengan penyebaran informasi yang cepat seperti sekarang banyak informasi yang menyatakan bahwa unit kerja pemerintah adalah salah satu tempat dimana terjadinya sebuah pemborosan dana keuangan negara, maka dari itu diperlukannya metode *value for money* yang bisa digunakan untuk menilai bagaimana kinerja instansi pemerintah dan setidaknya meminimalisir bahkan mungkin menghilangkan stigma yang telah muncul pada masyarakat tersebut. Metode *value for money* memiliki 3 elemen utama, yaitu: Menurut mardiasmo, terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*. (1) Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan *Input Value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. (2) Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu, efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (3) Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Dengan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa *value for money* adalah sebuah metode yang bisa digunakan dalam pengukuran kinerja sebuah organisasi/perusahaan yang tujuannya adalah memastikan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi/perusahaan tersebut telah digunakan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta tidak adanya pemborosan. Pada penelitian ini metode *value for money* akan digunakan peneliti sebagai perspektif analisis terhadap Laporan Kinerja instansi pemerintah yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan untuk menilai kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Manfaat metode Value For Money

Menurut Mardiasmo (2009: 07), manfaat penerapan metode *value for money* pada organisasi sektor publik adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. (2) Meningkatkan mutu pelayanan publik. (3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadi penghematan dalam penggunaan input. (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. (5) Meningkatkan kesadaran akan ruang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut pendapat Badrudin (2012: 97) yang dijelaskan pada bukunya yang berjudul *Ekonomika Otonomi Daerah* berpendapat bahwa, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan suatu rencana kerja pemerintah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan disebut peraturan daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2012: 203) mengatakan bahwa Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan. Otorisasi mengeluarkan di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi sesama aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu kebijakan/rencana yang dimiliki tiap-tiap daerah yang nantinya berguna untuk membantu daerah guna mencapai tujuan yang diinginkan, semisal digunakan untuk melakukan pembangunan gedung untuk bisnis, atau digunakan untuk pembangunan fasilitas umum lainnya yang nantinya akan berguna bagi masyarakat di daerah tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebuah produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban deputi bidang investigasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran lengkap bagaimana pertanggungjawaban sebuah organisasi atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap organisasi tiap periode kerja sesuai dengan pemanfaatan sumber daya yang telah digunakan apakah telah dinilai baik dalam proses mencapai tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang memiliki tujuan untuk memahami penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah menggunakan perspektif analisis *value for money* pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Objek yang akan digunakan oleh peneliti adalah unit kerja pemerintah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan, yaitu data sekunder dan data primer. (1) Data Primer. Data primer menurut Sugiyono (2016) adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. (2) Data Sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016) merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang atau dokumen lain sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Wawancara. Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden. Untuk berkomunikasi secara langsung. Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Guna memperoleh data primer, pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dan memahami sekali mengenai topik yang akan dibahas pada penelitian ini, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur pada bagian keuangan yang lebih memahami terkait data pada laporan keuangan yang akan peneliti tanyakan. (2) Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018: 476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sedangkan Hamidi (2004: 72) berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Pada penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dan juga berfungsi untuk melengkapi data primer dimana bentuk data sekunder yang berupa Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP), maka peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara menggunakan data laporan keuangan yang tersedia untuk diolah menjadi data yang bisa dikelola untuk penelitian ini.

Satuan Kajian

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan objek penelitian melalui penjabaran yang akan dilakukan setelah pengolahan dan analisa data yang telah diperoleh dari objek penelitian, dalam penelitian ini objek penelitian yang akan digunakan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat memiliki kinerja yang baik, dan juga melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Untuk mengukur dan menilai bagaimana kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur maka pada penelitian ini peneliti menggunakan perspektif analisis *value for money* sebagai perspektif analisis dalam melakukan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Utamanya Metode *value for money* memiliki 3 komponen utama, antara lain: (1) Ekonomi. Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan *Input Value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. (2) Efisiensi. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu, efisiensi merupakan perbandingan antara *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. (3) Efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Berdasar kepada ketiga komponen diatas maka bisa kita gunakan analisis *value for money* sebagai dasar pengukuran komponen-komponen tersebut sebagai berikut: (1) Pengukuran Ekonomi. Pengukuran Ekonomi terkait dengan bagaimana sebuah organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan *input resources* yang dimiliki pada program-program yang akan dilakukan di kemudian hari yang berfungsi untuk memenuhi tujuan organisasi, selain hal tersebut pada pengukuran ekonomi juga akan membandingkan bagaimana besaran *Input Value* yang didapatkan dari setiap program yang dibuat apakah organisasi dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengeluaran yang dianggap boros dan tidak tepat sasaran.

Kinerja organisasi akan dikategorikan ekonomis apabila telah memenuhi kriteria bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat memenuhi *output* yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas apabila persentase hasil perhitungan kurang dari 100% maka berarti kinerja perusahaan dinilai telah ekonomis, jika persentase hasil perhitungan lebih dari 100% maka berarti kinerja perusahaan dinilai tidak ekonomis, dan apabila persentase hasil perhitungan sama dengan 100% maka kinerja perusahaan dianggap ekonomis berimbang. (2) Pengukuran Efisiensi. Pengukuran efisiensi merupakan sebuah pengukuran yang digunakan dalam mengukur apakah besaran dari penggunaan *input* yang dikeluarkan oleh perusahaan telah memenuhi target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya, efisiensi juga dapat diartikan sebagai pencapaian *output* yang maksimal dengan penggunaan *input* yang sekecil mungkin. Pada pengukuran kinerja yang menggunakan metode *value for money*, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu: (a) Efisiensi Alokasi. Merupakan efisiensi yang terkait dengan kemampuan untuk memberdayakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. (b) Efisiensi Teknis atau Manajerial. Merupakan efisiensi yang terkait dengan kemampuan memberdayakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Pengukuran Efisiensi dapat dilakukan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi Teknis} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dikatakan efisien apabila *output* yang digunakan lebih kecil dari yang ditetapkan sementara *input* yang didapatkan sama dengan yang ditetapkan, atau *output* yang digunakan sama dengan yang ditetapkan sementara *input* yang didapatkan lebih besar dari yang ditetapkan, atau *output* yang digunakan lebih besar dari yang ditetapkan sementara *input* yang didapatkan juga lebih besar dari yang ditetapkan. (3) Pengukuran Ekonomis. Pengukuran Efektivitas merupakan pengukuran yang mengukur pencapaian hasil program yang telah dijalankan dengan target awal yang telah ditetapkan, Efektivitas juga menjadi salah satu tolak ukur berhasil tidaknya sebuah organisasi mencapai tujuannya, dan juga efektivitas tidak menyatakan tentang besaran biaya yang digunakan akan tetapi lebih kepada apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah dibuat.

Pengukuran Efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas apabila persentase hasil perhitungan kurang dari 100% maka kinerja perusahaan dinilai belum efektif, jika persentase dari hasil perhitungan lebih dari 100% maka kinerja perusahaan dinilai telah efektif, dan apabila persentase hasil perhitungan sama dengan 100% maka kinerja perusahaan dinilai efektif berimbang, yang bukan berarti tidak efektif namun tingkat efektivitas cukup untuk memenuhi kriteria efektif namun tidak melebihi kriteria efektif.

Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang telah diperoleh dengan dari melakukan penelitian terhadap objek yang telah ditentukan yang mana pada penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat berupa dokumen tertulis berupa laporan keuangan dan atau juga bisa berupa ucapan lisan yang didapat ketika melakukan wawancara. Lalu data yang telah diperoleh dapat diolah menggunakan metode *value for money* kemudian data yang telah diperoleh dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan.

Kegiatan utama penelitian ini adalah melakukan pengukuran kinerja terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan tujuan agar mengetahui apakah kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur telah memenuhi kategori ekonomis, efektif, dan efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif, Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang secara garis besar membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur juga mempunyai rencana dan strategi dalam menjalankan setiap kegiatannya, Sasaran pertama yaitu meningkatkan nilai tambah bruto Koperasi dan UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Maka dilakukanlah penelitian terhadap Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Hasil penelitian yang disajikan diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, analisis kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang menggunakan metode *Value For Money* sebagai metode analisisnya

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2019 dan 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tidak secara langsung memiliki pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan metode *Value for Money*, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat maka Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menyajikan tabel realisasi anggaran setiap program yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM menganggarkan dana Belanja Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 adalah sebesar Rp67.538.357.200 yang dialokasikan pada 9 (Sembilan) program, 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp65.432.996.354.

Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM menganggarkan dana Belanja Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 adalah sebesar Rp36.989.073.450 yang dialokasikan pada 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan. Anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp35.780.566.126.

Sebagai dasar pengukuran metode *Value for Money* peneliti menggunakan data Indikator utama program dan kegiatan yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas koperasi dan UKM	Pertumbuhan Koperasi Aktif	6 %	6 %	100%	Rp21.814.525.200	Rp21.566.814.403	98,86%
	Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi	15 produk	46 produk	307%	Rp15.063.404.000	Rp14.439.765.953	95,86%
	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi	60%	84%	140%	Rp7.205.178.600	Rp7.071.158.323	98,14%
	Kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya	5%	5,67%	113%	Rp12.088.640.800	Rp11.668.532.344	96,52%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Tabel diatas merupakan tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang menyajikan Sasaran kinerja, Indikator Kinerja, target, realisasi, dan capaian kinerja tahun 2019, serta alokasi, realisasi, dan capaian anggaran tahun 2019.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan	Nilai Tambah Koperasi dan UKM Binaan	8,75 T	6,08 T	69,25%	Rp26.290.903.050	Rp25.554.667.910	97,20%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Kinerja Perangkat Daerah	80,4 %	82,11 %	102,13%	Rp10.698.170.400	Rp10.225.898.216	95,59%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Tabel diatas merupakan tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang menyajikan Sasaran kinerja, Indikator Kinerja, target, realisasi, dan capaian kinerja tahun 2020, serta alokasi, realisasi, dan capaian anggaran tahun 2020.

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Menggunakan Perspektif Value For Money Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Ditinjau Dari Tingkat Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis membutuhkan data yang berkaitan dengan besaran anggaran yang diterapkan serta juga besaran dana realisasi yang digunakan, Kinerja organisasi dapat digolongkan ekonomis ketika realisasi anggaran yang digunakan lebih kecil daripada anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ekonomis dilakukan dengan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan 2020, maka pengukuran tingkat ekonomis diukur sebagai berikut:

Pengukuran Ekonomis tahun 2019:
Pertumbuhan Koperasi Aktif

$$= \frac{\text{Rp21.566.814.403}}{\text{Rp21.814.525.200}} \times 100\%$$

$$= 98.86\%$$

Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi:

$$= \frac{\text{Rp}14.439.765.953}{\text{Rp}15.063.404.000} \times 100\%$$

$$= 95,86\%$$

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi:

$$= \frac{\text{Rp}7.071.158.323}{\text{Rp}7.205.178.600} \times 100\%$$

$$= 98,14\%$$

Kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya:

$$= \frac{\text{Rp}11.668.532.344}{\text{Rp}12.088.640.800} \times 100\%$$

$$= 96,52\%$$

Pengukuran Ekonomis tahun 2020:

Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan:

$$= \frac{\text{Rp}25.554.667.910}{\text{Rp}26.290.903.050} \times 100\%$$

$$= 97,20\%$$

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP:

$$= \frac{\text{Rp}10.225.898.216}{\text{Rp}10.698.170.400} \times 100\%$$

$$= 95,59\%$$

Hasil pengukuran diatas adalah hasil pengukuran Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang dilaksanakan. Indikator Kinerja yang pertama pada tahun 2019 adalah Pertumbuhan Koperasi Aktif, setelah dilakukan pengukuran berdasar data yang ada, Indikator tersebut memperoleh persentase hasil pengukuran ekonomis sebesar 98,86 persen, hasil itu membuat pertumbuhan koperasi aktif dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara ekonomis dan tidak terjadi pemborosan karena tanpa menggunakan semua anggaran yang tersedia indikator tersebut tetap mampu mencapai targetnya.

Indikator kinerja yang kedua adalah Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi, setelah dilakukan pengukuran ekonomis berdasar data yang ada, Indikator tersebut memperoleh persentase hasil pengukuran ekonomis sebesar 95,86 persen, hasil tersebut membuat Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi pada tahun 2019 disimpulkan dalam pelaksanaannya dilakukan secara ekonomis dan tidak terjadi pemborosan disaat melakukan kinerja, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengukuran ekonomis yang menyatakan penggunaan anggaran untuk mencapai target masih memiliki selisih dengan anggaran yang direncanakan.

Indikator kinerja yang ketiga adalah persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi, setelah dilakukan pengukuran ekonomis berdasar dengan data yang ada indikator tersebut memperoleh hasil pengukuran ekonomis sebesar 98,14 persen, hasil tersebut membuat persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara ekonomis dan tidak terjadi pemborosan disaat melakukan kinerja, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengukuran ekonomis yang menyatakan penggunaan anggaran untuk mencapai target masih memiliki selisih dengan anggaran yang direncanakan.

Indikator kinerja yang terakhir pada tahun 2019 adalah kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya, setelah dilakukan pengukuran ekonomis dengan data yang tersedia, indikator tersebut memperoleh hasil pengukuran ekonomis sebesar 96,52 hasil tersebut membuat kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara ekonomis dan tidak terjadi pemborosan disaat melakukan kinerja, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengukuran ekonomis yang menyatakan penggunaan anggaran untuk mencapai target masih memiliki selisih dengan anggaran yang direncanakan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur telah melakukan kinerja yang Ekonomis dibuktikan dengan kecilnya realisasi.

Penggunaan anggaran daripada jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi biaya yang tidak diperlukan atau tidak terjadi pemborosan. Indikator pertama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 adalah Nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan. Setelah dilakukan pengukuran berdasar data yang ada, Indikator tersebut memperoleh persentase hasil pengukuran sebesar 97,20 persen, Hasil tersebut membuat Nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur telah berhasil meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan dan menggunakan realisasi anggaran dibawah anggaran yang telah direncanakan dan membuat indikator ini dapat dikategorikan ekonomis.

Indikator kinerja kedua pada tahun 2020 adalah Nilai evaluasi implementasi SAKIP. setelah dilakukan pengukuran berdasar data yang ada, Indikator tersebut mendapatkan hasil persentase pengukuran ekonomis sebesar 95,59 persen. Hasil tersebut membuat Nilai evaluasi implementasi SAKIP telah terlaksana secara ekonomis, mengingat tidak adanya pemborosan anggaran dari yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Ditinjau Dari Tingkat Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* yang sekecil mungkin atau juga penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Pengukuran Efisiensi merupakan sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengukur besaran *input* yang telah dikeluarkan oleh perusahaan/organisasi telah melebihi target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi Teknis} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Berikut adalah tabel Pengukuran Efisiensi yang telah direncanakan dengan yang direalisasikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dan 2020:

Tabel 3
Perbandingan tingkat efisiensi yang direncanakan dengan yang direalisasikan tahun 2019

URAIAN	RENCANA			REALISASI		
	(Output) Target Hasil	(Input) Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (Rp)	(Output) Realisasi Hasil	(Input) Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (Rp)
Meningkatnya Kualitas koperasi dan UKM						
Pertumbuhan Koperasi Aktif	6%	21.814.525.200	3.635.754.200	6%	21.566.814.403	3.594.469.067
Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi	15 produk	15.063.404.000	1.004.226.933	46 produk	14.439.765.953	313.907.955
Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi	60 %	7.205.178.600	120.086.310	84 %	7.071.158.323	84.180.456
Kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya	5 %	12.088.640.800	2.417.728.160	5,67%	11.668.532.344	2.057.942.212

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Tabel 4
Perbandingan tingkat efisiensi yang direncanakan dengan yang direalisasikan tahun 2020

URAIAN	RENCANA			REALISASI		
	(Output) Target Hasil	(Input) Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (Rp)	(Output) Target Hasil	(Input) Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi (Rp)
Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan						
Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan	8,75 T	26.290.903.050		6,08 T	25.554.667.910	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	80,4 %	10.698.170.400	133.061.820	82,11%	10.225.898.216	124.539.011

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Pertumbuhan koperasi aktif memiliki program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM seperti Program pembinaan dan pengawasan kelembagaan

Koperasi dan UKM yang memiliki kegiatan diantaranya penataan dan penertiban kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi; penataan organisasi, badan hukum, dan perjanjian tata laksana koperasi dan UKM; sosialisasi kebijakan koperasi dan UKM; penyuluhan dan advokasi kelembagaan koperasi dan UKM; penilaian kualitas kinerja koperasi dan UKM; pengawasan koperasi dan UKM. Program peningkatan kapasitas SDM koperasi yang memiliki kegiatan diantaranya penguatan sarana dan prasarana UPT diklat koperasi dan UKM; penguatan kualitas diklat koperasi dan UKM; peningkatan kapasitas koperasi, UKM; penyelenggaraan diklat koperasi UKM; pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM.

Pertumbuhan koperasi aktif pada tahun 2019 memiliki target pencapaian sebesar 6 persen dengan anggaran Rp21.814.525.200 memiliki tingkat efisiensi Rp3.635.754.200 tiap persennya, sedangkan pada realisasi pencapaiannya memperoleh hasil sebesar 6 persen dan menggunakan realisasi anggaran sebesar Rp21.566.814.403 memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp3.594.469.067 tiap persennya. Hasil pengukuran tersebut membuat indikator kinerja pertumbuhan koperasi aktif dapat dinyatakan efisien dalam kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya.

Jumlah produk koperasi dan UKM terstandarisasi memiliki program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut seperti, Program penguatan produksi dan restrukturisasi usaha yang memiliki kegiatan diantaranya adalah Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM; Standardisasi produk Koperasi dan UKM; Pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui *business development centre*; Penguatan usaha Koperasi dan UKM; Penguatan dan perlindungan usaha Koperasi dan UKM; Restrukturisasi usaha Koperasi dan UKM.

Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi pada tahun 2019 memiliki target sebesar 15 produk dengan anggaran Rp15.063.404.000 memiliki tingkat efisiensi Rp1.004.226.933 tiap produknya, Sedangkan pada realisasi pencapaiannya memperoleh hasil sebesar 46 produk dan menggunakan realisasi anggaran sebesar Rp14.439.765.953 memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp313.907.955 tiap produknya. Hasil pengukuran tersebut membuat indikator kinerja jumlah produk koperasi dan UKM terstandarisasi dapat dinyatakan efisien dalam kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya.

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi memiliki program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut seperti, program peningkatan akses pembiayaan koperasi UKM yang memiliki kegiatan diantaranya adalah Penguatan akses permodalan Koperasi dan UKM; Penguatan usaha syariah melalui KSP dan pembiayaan syariah; Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi; Penguatan akses pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi dan UKM.

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi pada tahun 2019 memiliki target sebesar 60 persen dengan anggaran Rp7.205.178.600 memiliki tingkat efisiensi Rp120.086.310 tiap persennya, Sedangkan pada realisasi pencapaiannya memperoleh hasil sebesar 84 persen dan menggunakan realisasi anggaran sebesar Rp7.071.158.323 memiliki tingkat efisien sebesar Rp84.180.456 tiap persennya. Hasil tersebut membuat Indikator kinerja persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi dapat dinyatakan efisien dalam kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya.

Kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya memiliki program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut, seperti program pemasaran produk koperasi UKM yang memiliki kegiatan diantaranya adalah Kemitraan usaha bagi Koperasi dan UKM; Penguatan informasi pasar bagi Koperasi dan UKM; Promosi produk Koperasi dan UKM melalui pameran dalam dan luar negeri; Penguatan sarana promosi produk Koperasi dan UKM.

Kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya pada tahun 2019 memiliki target sebesar 5 persen dengan anggaran Rp12.088.640.800 memiliki

tingkat efisiensi Rp120.086.310 tiap persennya, Sedangkan pada realisasi pencapaiannya memperoleh hasil sebesar 5,67 persen dan menggunakan realisasi anggaran sebesar Rp7.071.158.323 memiliki tingkat efisien sebesar Rp84.180.456 tiap persennya. Hasil tersebut membuat kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya dapat dinyatakan efisien dalam kinerja pelaksanaannya program dan kegiatannya.

Nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan memiliki program pembangunan yang membantu dalam hal mencapai target yang telah ditetapkan seperti Program pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan UKM yang memiliki kegiatan diantaranya Penguatan organisasi dan tata laksana koperasi dan UKM; Penyuluhan advokasi dan hukum kepada Koperasi dan UKM; Pengawasan dan akuntabilitas kinerja koperasi dan UKM, Program penguatan usaha produksi dan restrukturisasi usaha yang memiliki kegiatan seperti kegiatan penguatan kualitas produksi koperasi dan UKM, penguatan usaha Koperasi dan UKM, dan restrukturisasi usaha Koperasi dan UKM. Program peningkatan akses pembiayaan koperasi UKM memiliki kegiatan yang membantu dalam upaya pencapaian target seperti penguatan modal bagi Koperasi dan UKM; penguatan usaha simpan pinjam; dan juga penguatan akses pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi dan UKM. Program pemasaran produk koperasi UKM memiliki kegiatan diantaranya penguatan jaringan pemasaran Koperasi dan UKM; penguatan dan pengembangan informasi pasar; serta penguatan promosi produk Koperasi dan UKM. Program yang terakhir adalah program penguatan kapasitas SDM koperasi UKM yang dimana memiliki kegiatan diantaranya penguatan sarana dan prasarana UPT pelatihan Koperasi dan UKM; Penguatan Kualitas Pelatihan Koperasi dan UKM; Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi UKM; dan Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM.

Nilai evaluasi implementasi SAKIP memiliki program dan kegiatan seperti program pelayanan kesekretariatan Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah yang memiliki kegiatan diantaranya adalah penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran; pengelolaan administrasi dan keuangan; dan ketatausahaan dan kepegawaian.

Nilai evaluasi implementasi SAKIP memiliki target pencapaian sebesar 80,4 persen dengan anggaran Rp10.698.170.400 memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp133.061.820 tiap persennya, sedangkan pada realisasi pencapaiannya memperoleh hasil sebesar 82,11 persen dan menggunakan realisasi anggaran sebesar Rp10.225.898.216 memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp124.539.011 tiap persennya. Hasil pengukuran tersebut membuat indikator kinerja nilai evaluasi implementasi SAKIP dapat dinyatakan efisien dalam kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya.

Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Ditinjau Dari Tingkat Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, Pengukuran Efektivitas merupakan pengukuran yang mengukur pencapaian hasil program yang telah dijalankan dengan target awal yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini pengukuran efektivitas diukur dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dan 2020 sebagai sumber data, maka pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pengukuran Efektivitas
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Koperasi Aktif	6 persen	6 persen	100%
		Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi	15 produk	46 produk	307%
		Persentase Pengajuan Pembiayaan yang lulus verifikasi	60 persen	84 persen	140%
		Kenaikan Volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya	5 persen	5,67 persen	113%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Tabel 6
Pengukuran Efektivitas
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan	Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UKM Binaan	8,75 T	6,08 T	69,25%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	80,4 persen	82,11 persen	102,13%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2022.

Berdasarkan tabel pengukuran efektivitas pada pencapaian kinerja tahun 2019 dapat terlihat ada 4 indikator kinerja dalam melaksanakan sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan UKM. Indikator kinerja pertama merupakan pertumbuhan koperasi aktif memiliki anggaran sebesar Rp21.814.525.200 dan terealisasi sebesar Rp21.566.814.403 dengan pertumbuhan koperasi aktif sebesar target 6 persen dan terealisasi sebesar 6 persen juga, Setelah dilakukan pengukuran efektivitas maka didapatkan hasil persentase sebesar 100 persen, Hasil tersebut menjadikan indikator kinerja tersebut dinilai telah efektif berimbang karena hasil persentasenya tepat di 100 persen.

Indikator kinerja kedua merupakan jumlah produk koperasi dan UKM terstandarisasi memiliki anggaran sebesar Rp15.063.404.000 dan terealisasi sebesar Rp14.439.765.953 dengan target produk koperasi dan UKM yang terstandarisasi sebanyak 15 produk dan terealisasi sebanyak 46 produk yang terstandarisasi, Setelah dilakukan pengukuran efektivitas maka didapatkan hasil persentase sebesar 207 persen, Hasil tersebut menjadikan indikator kinerja tersebut dinilai telah efektif karena hasil persentasenya telah melebihi 100 persen.

Indikator kinerja yang ketiga merupakan persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi memiliki anggaran sebesar Rp7.205.178.600 dan terealisasi sebesar Rp7.071.158.434 dengan target persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi sebesar 60 persen dan terealisasi sebesar 84 persen pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi, setelah dilakukan pengukuran efektivitas maka didapatkan hasil persentase sebesar 140 persen, Hasil tersebut menjadikan indikator kinerja tersebut dinilai telah efektif karena hasil persentasenya telah melebihi 100 persen.

Indikator terakhir pada pencapaian kinerja tahun 2019 adalah kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya yang memiliki anggaran sebesar Rp12.088.640.800 dan terealisasi sebesar Rp11.668.532.344 dengan target kenaikan volume penjualan Koperasi dan UKM yang difasilitasi pemasarannya sebesar 5 persen dan terealisasi sebesar 5,67 persen, setelah dilakukan pengukuran efektivitas maka didapatkan hasil sebesar 113 persen, Hasil tersebut menjadikan indikator kinerja tersebut dinilai telah efektif karena hasil persentasenya telah melebihi 100 persen.

Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2020 terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Sasaran Strategis yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan yang memiliki indikator berupa nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan yang memiliki anggaran sebesar Rp26.290.903.050 dan terealisasi sebesar Rp25.554.667.910. Setelah dilakukan pengukuran efektivitas pada sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut didapatkan hasil persentase sebesar 69,25 persen, Hasil tersebut menjadikan sasaran strategis dan indikator dinilai belum efektif karena hasil persentasenya yang kurang dari 100 persen.

Penilaian yang belum efektif itu bisa terjadi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia, seperti yang dikatakan oleh ibu Arina Nur Fauziyah selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bahwa:

“Pada saat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kami juga mengadakan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office(WFO)* sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang akhirnya sedikit banyak berpengaruh karena pola kerja yang berubah, yang biasanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara *offline* akhirnya tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya”.

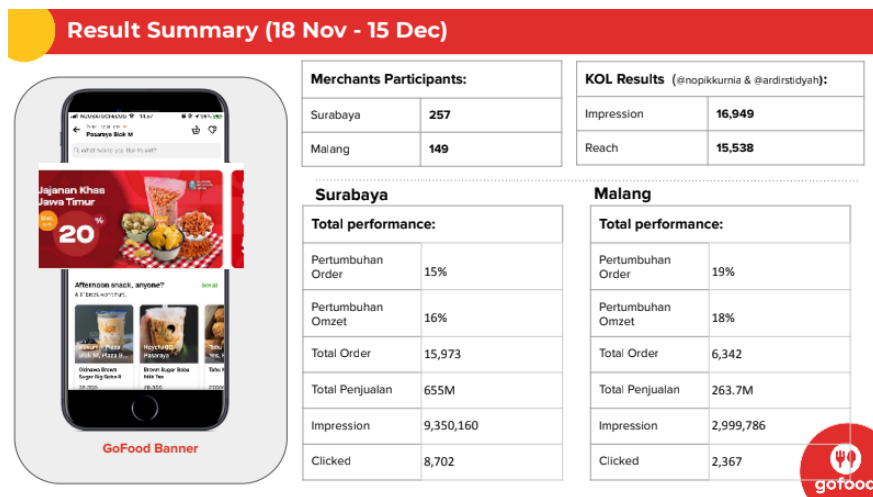
Beberapa alasan lain yang menyebabkan nilai tambah bruto Koperasi dan UKM binaan adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli pada saat itu, Alasan lainnya adalah ketika kegiatan perekonomian tidak bergerak maka banyak perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya untuk mendapat pemasukan yang berimbas pada kerugian perusahaan yang mengakibatkan banyaknya Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan untuk mengefisienkan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Hal tersebut berakibat pada masyarakat yang akhirnya daya belinya menurun. Kegiatan dan program yang ada pada kedua tahun tersebut tampak cukup berbeda dalam jumlahnya dikarenakan adanya dampak dari pandemi *Covid-19* yang muncul pada tahun 2020, seperti yang diucapkan oleh Ibu Arina Nur Fauziyah selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur:

“Saat pandemi, terjadi *Refocusing* anggaran yang menyebabkan adanya penyesuaian dikarenakan ada perintah dari pemerintah pusat yang saat itu fokusnya pada penanganan sektor kesehatan yang membuat penganggaran ada penyesuaian-penyesuaian, dan juga karena tidak bisa melakukan banyak kegiatan jadinya anggaran- anggaran tersebut difokuskan kepada sektor kesehatan”.

Pada akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan November Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama bersama GOJEK untuk mengadakan kegiatan yang bernama “Jajanan Khas Jawa Timur” dimana program tersebut dilakukan selama 2 (dua) minggu dilakukan dengan cara memberikan promosi bagi *merchant* UMKM yang ada pada Gofood yang berlokasi di kota Surabaya dan Malang.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 257 *merchant* yang berada di kota Surabaya dan 149 *merchant* yang berada di kota Malang dan program tersebut diadakan selama 2 minggu dilakukan pada bulan November 2020. Berikut adalah hasil dari kegiatan tersebut:



Gambar 1
Program kerjasama “Jajanan Khas Jawa Timur” Gofood dengan UMKM
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ibu Arina Nur Fauziyah mengatakan bahwa:

“Kita kerjasama dengan gojek melakukan sebuah program kerjasama pemberian promosi terhadap UMKM dan hasilnya cukup bagus sekali, karena terlihat perkembangannya pesat sekali. Pertumbuhan order selama 2 minggu itu meningkat sampai 15 persen, Sementara pertumbuhan Omzet 18 persen”.

Hal tersebut dirasa telah menjadi titik balik kembalinya daya beli masyarakat yang mulai kembali yang sebelumnya sempat menurun ketika adanya pandemi.

Sasaran strategis dan indikator kedua pada tahun 2020 adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan nilai evaluasi implementasi SAKIP yang memiliki anggaran sebesar Rp10.698.170.400 dan terealisasi sebesar Rp10.225.898.216. Setelah dilakukan pengukuran efektivitas pada sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut didapatkan hasil persentase sebesar 102,13 persen, Hasil tersebut menjadikan sasaran strategis dan indikator dinilai telah efektif karena hasil persentasenya yang melebihi dari 100 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah menggunakan perspektif analisis *value for money*. Objek penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur dan sampel penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada pengukuran ekonomis indikator utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang memiliki yang memiliki 4 indikator, seluruhnya mendapatkan hasil persentase pengukuran yang menunjukkan hasil telah dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan pada tahun 2019 secara Ekonomis karena penggunaan realisasi anggaran lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan, dan pada pengukuran ekonomis indikator utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang memiliki yang memiliki 2 indikator, kedua indikator utama tersebut juga mendapatkan hasil persentase pengukuran yang menunjukkan hasil telah dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan pada tahun 2020 secara Ekonomis karena penggunaan realisasi anggaran lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan. (2) Pada pengukuran efisiensi indikator utama dinas koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang memiliki yang memiliki 4 indikator, seluruhnya

menunjukkan Realisasi tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan Rencana tingkat efisiensi yang telah ditetapkan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2019 telah dilaksanakan secara efisien. Dan pada pengukuran efisiensi indikator utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang memiliki yang memiliki 2 indikator utama dan pada pengukurannya salah satunya mendapat hasil pengukuran yang telah efisien. (3) Pada pengukuran efektivitas indikator utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang memiliki yang memiliki 4 indikator, seluruhnya mendapatkan hasil persentase pengukuran yang menunjukkan hasil telah dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan pada tahun 2019 secara efektif dikarenakan seluruh realisasi capaian memiliki hasil yang sama dan lebih besar dari target capaian yang ditetapkan, dan pada pengukuran ekonomis indikator utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yang memiliki yang memiliki 2 indikator, Indikator pertama menunjukkan hasil Pengukuran yang kurang efektif karena tidak dapat memenuhi capaian target, sementara indikator kedua menunjukkan hasil pengukuran yang telah efektif karena telah realisasi capaian telah melampaui target capaian.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan dan dijalankan secara baik dan teratur sesuai dengan prosedur ilmiah yang ada, Dalam pelaksanaannya penelitian ini juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dirasa bisa diperbaiki di kemudian hari. Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pada penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan 2020 laporan tersebut tidak terdapat pengukuran kinerja *Outcome* berdasarkan metode *Value For Money*. (2) Penyajian laporan program dan kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dirasa oleh penulis kurang, karena hanya menyajikan target dan realisasi anggaran tidak adanya penyajian target dan realisasi non anggaran (kinerja) pada setiap program dan kegiatan. Ketika peneliti mencoba meminta data tersebut jika memang ada diluar LAKIP, data tersebut sulit ditemukan dikarenakan adanya pergantian pegawai yang bertanggung jawab pada pembuatan laporan tersebut. (3) Pada saat melakukan pengumpulan data penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam memperoleh data karena terbatas hanya memiliki 1 (satu) narasumber.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah disebutkan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Disarankan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur kedepannya untuk melakukan pengembangan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang relevan, terutama indikator kinerja *Output dan Outcome*. (2) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas jumlah data objek penelitiannya serta jika memungkinkan menggunakan data objek penelitian yang terbaru agar saat pengolahan data tersebut peneliti selanjutnya memiliki variasi sampel yang lebih banyak. (3) Disarankan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur kedepannya untuk menyajikan juga Rencana dan Realisasi Target Hasil non anggaran (kinerja) program dan kegiatan yang ada, karena dengan adanya data tambahan tersebut akan mempermudah peneliti selanjutnya untuk melengkapi data penelitiannya. (4) Disarankan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk kedepannya memiliki sebuah server data yang memuat kumpulan data-data yang sekiranya berfungsi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dari yang terdahulu hingga yang terbaru, agar jika ada data yang akan digunakan lebih mudah untuk ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2021. *Laporan Kinerja Akuntabilitas*. Diakses pada 27 April 2022 dari <http://www.bpkp.go.id/investigasi/konten/2087/Laporan-Akuntabilitas-Kinerja>
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Fahmi, I. 2013. *Prilaku Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Halim, A. dan M.S. Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- _____. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Menpan RB Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 53. Jakarta.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem, Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 53. Jakarta.
- Sari, Nindy Cahya Feriska . Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *value for money* (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*. 3(1).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta. Bandung.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Tim Penyusun LAKIP. 2019. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Tim Penyusun LAKIP. 2020. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Yunita dan Chirtianingrum. 2018. Measurement of Accountability Management of Village Funds. *Jurnal facultas of Economy University of Bangka Belitung*. 2(1), 100-102.
- Yuwono, S., E. Sukarno, dan M. Ikhsan. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.